Volume -, Number -, Month Year
p-ISSN: xxxx-xxxx and e- ISSN: xxxx-xxxx

JA RUM
Journal of Analysis Research and Management Review

PENGARUH REGULASI LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN TERHADAP INVESTASI: STUDI KASUS UNI EROPA

Rara Gusnita Putri[1], Ritauli Puspita Dewi[2], Uswatun Hasanah[3], dan Rahmatun Nadilla Fatimah[4]

[1]Hubungan Internasional, Universitas Lampung
email: rara.gusnitaputri@fisip.unila.ac.id
[2]Hubungan Internasional, Universitas Lampung
email: 2316071013@students.unila.ac.id
[3]Hubungan Internasional, Universitas Lampung
email: 2316071035@students.unila.ac.id
[4]Hubungan Internasional, Universitas Lampung
email: 2316071070@students.unila.ac.id

Abstrak. *This study examines the impact of environmental regulations and sustainability frameworks on investment decisions in the European Union (EU), with a focus on the European Green Deal, EU Taxonomy Regulation, and the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Methods: Using a systematic review of empirical literature and secondary data drawn from EU institutional reports, Eurostat databases, and panel data studies covering the period 2014–2023, this study employs a descriptive-analytical approach to synthesize evidence on investment trends, green finance flows, and regulatory compliance costs. Results: Findings indicate that stringent environmental regulations have a dual effect on investment: they impose short-term compliance costs that may deter certain types of foreign direct investment (FDI), yet simultaneously stimulate long-term green investment by reducing uncertainty and improving market credibility for sustainable assets. The EU Taxonomy Regulation has significantly channeled private capital toward environmentally aligned activities, with green bond issuance in the EU exceeding €500 billion by 2023. Implications: The study concludes that well-designed and predictable environmental regulations can enhance investment attractiveness rather than impede it, particularly when complemented by public green finance incentives. Policymakers in Muslim-majority countries may draw lessons from the EU experience to design regulatory frameworks that balance environmental sustainability with economic development goals.*

Keywords: *environmental regulation, European Union, green investment, sustainability framework, sustainable finance.*

I. PENDAHULUAN

Persinggungan antara kebijakan lingkungan dan investasi ekonomi telah muncul sebagai salah satu perdebatan paling krusial dalam tata kelola ekonomi kontemporer. Seiring dengan semakin nyatanya dampak perubahan iklim, pemerintah dan lembaga-lembaga supranasional telah merespons dengan serangkaian regulasi lingkungan yang terus berkembang, yang bertujuan untuk mengarahkan kembali aktivitas ekonomi menuju jalur yang lebih berkelanjutan. Uni Eropa (UE) berada di garis terdepan pergeseran regulasi global ini, dengan telah mengembangkan salah satu arsitektur tata kelola lingkungan yang paling komprehensif dan ambisius di dunia.

European Green Deal, yang diluncurkan pada Desember 2019, merupakan komitmen bersejarah untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050, dengan target pengurangan emisi antara sebesar minimal 55% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2030. Menyertai agenda kebijakan menyeluruh ini adalah beberapa instrumen regulasi yang memiliki implikasi mendalam bagi investasi: Regulasi Taksonomi UE (*Regulation* (EU) 2020/852), yang menciptakan sistem klasifikasi bagi kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan; Regulasi Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (SFDR), yang mewajibkan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan oleh para pelaku pasar keuangan; serta Arahan Pelaporan Keberlanjutan Korporat (CSRD), yang memperluas kewajiban pengungkapan non-keuangan kepada cakupan perusahaan yang lebih luas.

Pertanyaan sentral yang mendasari penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara kerangka regulasi lingkungan tersebut dan perilaku investasi. Teori ekonomi tradisional, yang dibangun di atas perspektif neoklasik, mengasumsikan adanya pertukaran (trade-off) antara regulasi lingkungan dan kinerja ekonomi: standar lingkungan yang lebih ketat meningkatkan biaya kepatuhan dan dengan demikian mengurangi profitabilitas perusahaan, daya tarik investasi, serta daya saing. Namun, pandangan ini telah ditantang oleh Hipotesis Porter (Porter & Linde, 1995), yang berpendapat bahwa regulasi lingkungan yang dirancang dengan baik dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya memperkuat daya saing ekonomi.

Kesenjangan penelitian yang melatarbelakangi studi ini terletak pada terbatasnya sintesis empiris yang mengkaji bagaimana lanskap regulasi UE pasca-2019 khususnya penekanannya pada taksonomi keuangan berkelanjutan dan pengungkapan wajib memengaruhi baik arus investasi tradisional maupun investasi hijau. Meskipun studi-studi individual telah mengkaji instrumen-instrumen tertentu, analisis holistik yang mengintegrasikan desain regulasi, biaya kepatuhan, dan hasil investasi dalam konteks UE masih belum banyak dieksplorasi.

Tujuan penelitian ini bersifat tiga arah: (1) untuk memetakan instrumen-instrumen regulasi lingkungan utama yang diperkenalkan oleh UE dalam periode 2019–2023 beserta mekanisme pengaruhnya terhadap investasi; (2) untuk mensintesis bukti empiris mengenai hubungan antara keketatan regulasi lingkungan dan tingkat investasi di UE; serta (3) untuk menilai efektivitas kerangka keuangan berkelanjutan UE dalam memobilisasi investasi hijau dan mengarahkan modal swasta menuju kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.

Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Bagian 2 mengulas literatur teoritis dan empiris mengenai regulasi lingkungan dan investasi. Bagian 3 menjelaskan metodologi penelitian. Bagian 4 menyajikan dan mendiskusikan hasil penelitian. Bagian 5 diakhiri dengan implikasi kebijakan dan rekomendasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis: Regulasi Lingkungan dan Investasi

Hubungan teoritis antara regulasi lingkungan dan investasi masih diperdebatkan. Perspektif neoklasik yang dominan, yang dikemukakan oleh Pigou (1920) dan dioperasionalkan melalui regulasi *command-and-control*, memandang standar lingkungan sebagai bentuk pembebanan biaya. Dari sudut pandang ini, kepatuhan terhadap regulasi mengalihkan sumber daya dari investasi produktif, mengurangi tingkat pengembalian modal, dan dapat mendorong pelarian modal ke yurisdiksi yang kurang diregulasi suatu fenomena yang dalam literatur disebut sebagai '*pollution haven hypothesis*' (Copeland & Taylor, 2004).

Aliran teoritis yang lebih optimistis diwakili oleh Hipotesis Porter, yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan

yang ketat namun fleksibel dapat merangsang inovasi dengan mendorong perusahaan untuk memikirkan ulang proses produksi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, dan mengidentifikasi efisiensi yang dapat mengimbangi biaya kepatuhan. Hipotesis ini telah mendapat pengkajian empiris yang luas. Ambec et al. (2013) mengidentifikasi dua versi Hipotesis Porter: versi lemah, yang menyatakan bahwa regulasi mendorong lebih banyak inovasi, dan versi kuat, yang mengklaim bahwa inovasi yang didorong oleh regulasi dapat secara nyata meningkatkan daya saing dan profitabilitas perusahaan.

Perspektif teoritis ketiga berasal dari teori keuangan berkelanjutan, yang menekankan peran asimetri informasi dalam keputusan investasi. Pengungkapan wajib atas risiko lingkungan dan metrik keberlanjutan dapat mengurangi biaya informasi bagi investor, menurunkan ketidakpastian, dan dengan demikian mendorong realokasi modal menuju aset hijau (Nipper et al., n.d.). Regulasi Taksonomi UE secara eksplisit didasarkan pada logika ini: dengan menstandarisasi definisi kegiatan berkelanjutan, regulasi ini bertujuan untuk mengurangi masalah '*greenwashing*' dan meningkatkan kredibilitas produk investasi hijau.

2.2 Bukti Empiris tentang Regulasi Lingkungan dan Investasi di UE

Penelitian empiris dalam konteks UE telah menghasilkan temuan yang beragam. Rubashkina et al. (2015), menggunakan data panel tingkat sektoral dari industri manufaktur Eropa, menemukan bukti yang mendukung versi lemah Hipotesis Porter: regulasi lingkungan yang diukur melalui pengeluaran pengendalian dan penanggulangan polusi (*pollution abatement and control expenditure*/PACE) berpengaruh positif terhadap output paten (sebagai proksi inovasi), meskipun mereka tidak menemukan bukti untuk versi kuat, karena total faktor produktivitas tidak terpengaruh.

Penelitian yang lebih mutakhir berfokus pada arsitektur regulasi UE pasca-2019. Sebuah studi panel yang mencakup tujuh negara UE dan empat sektor industri untuk periode 2014–2023 menginvestigasi hubungan antara perpajakan lingkungan dan *eco-investment*, menemukan bahwa meskipun penerimaan pajak berkorelasi positif dengan investasi modal hijau, efeknya sangat heterogen antar negara dan sektor (Noailly, 2022). Heterogenitas ini menggarisbawahi pentingnya prediktabilitas regulasi dan langkah-langkah kebijakan komplementer.

Peran Regulasi Taksonomi UE dalam mengarahkan investasi telah dipelajari melalui metode eksperimental dan kuasi-eksperimental. Nipper et al. (2022) menemukan bahwa pengungkapan wajib atas metrik pendapatan hijau yang terstandarisasi berdasarkan Regulasi Taksonomi secara signifikan meningkatkan probabilitas investor dalam memilih produk keuangan hijau, yang mengindikasikan bahwa persyaratan transparansi dapat secara efektif mengalihkan modal swasta. Temuan mereka menyiratkan bahwa pelaporan yang selaras dengan taksonomi bersifat komplementer, bukan substitusi, terhadap penilaian keberlanjutan yang ada.

Paket Keuangan Berkelanjutan Komisi Eropa tahun 2023 selanjutnya memperluas taksonomi untuk mencakup kegiatan ekonomi tambahan di sektor manufaktur dan transportasi, dengan tujuan meningkatkan kegunaan dan cakupan instrumen tersebut (Directorate-General for Financial Stability, 2023). Bukti dari sumber institusional UE dan data Eurostat mengindikasikan bahwa penerbitan obligasi hijau di UE melampaui €500 miliar pada tahun 2023, dengan porsi yang signifikan dapat dikaitkan dengan investasi yang selaras dengan taksonomi, mencerminkan semakin terintegrasinya kerangka regulasi dengan perilaku pasar modal.

Literatur juga mengidentifikasi potensi ketegangan dan *trade-off*. Noailly (2022) mencatat bahwa kebijakan pajak

saja tidak memadai jika tidak dikombinasikan dengan prediktabilitas regulasi dan stabilitas lingkungan keuangan. Demikian pula, studi-studi terhadap 22 negara UE mendokumentasikan kinerja yang tidak merata antar negara anggota: sementara negara-negara berpendapatan tinggi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat cenderung mendapat manfaat dari stimulus investasi hijau, anggota UE berpendapatan rendah dengan investasi modal hijau publik yang terbatas mungkin kesulitan memenuhi target iklim tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran (Nerlich et al., 2025).

2.3 Kesenjangan Penelitian

Literatur yang ada telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi-dimensi spesifik dari keterkaitan antara regulasi dan investasi, namun beberapa kesenjangan masih tersisa. Pertama, sebagian besar penelitian empiris mendahului implementasi penuh arsitektur keuangan berkelanjutan UE (pasca-2021), sehingga sulit untuk menilai efek gabungan dari Taksonomi, SFDR, dan CSRD terhadap hasil investasi. Kedua, literatur cenderung berfokus pada efek inovasi atau investasi agregat tanpa secara memadai membedakan antara investasi hijau, foreign direct investment (FDI), dan pembentukan modal domestik. Ketiga, implikasi kebijakan bagi perekonomian non-UE, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim yang berupaya mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan, masih belum berkembang. Studi ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut melalui sintesis sistematis atas bukti-bukti terkini.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif-deskriptif yang didasarkan pada tinjauan literatur sistematis dan analisis data sekunder. Mengingat tujuan utama untuk mensintesis hubungan antara regulasi lingkungan UE dan investasi dalam lanskap kelembagaan yang kompleks, pendekatan deskriptif-analitis dinilai tepat. Desain ini memungkinkan integrasi bukti dari berbagai tradisi metodologis termasuk studi panel ekonometrik, analisis kelembagaan, dan evaluasi kebijakan untuk membangun gambaran yang koheren dan berdasar secara teoritis mengenai keterkaitan antara regulasi dan investasi.

3.2 Sumber Data

Sumber data primer mencakup publikasi resmi institusi UE, khususnya komunikasi Komisi Eropa, teks regulasi, dan laporan evaluasi kebijakan yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024 (European Commission, 2019). Data sekunder bersumber dari: (1) basis data Eurostat yang mencakup arus investasi hijau, penerimaan perpajakan lingkungan, dan penerbitan obligasi berkelanjutan di seluruh negara anggota UE; (2) studi empiris yang telah melalui penelaahan sejawat (*peer-reviewed*) yang diidentifikasi melalui basis data termasuk Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, menggunakan istilah pencarian yang menggabungkan *EU environmental regulation, green investment, EU Taxonomy, sustainable finance, dan Porter Hypothesis*; serta (3) makalah kerja dan laporan dari lembaga penelitian terkemuka, termasuk *European Environment Agency (EEA), European Central Bank (ECB), dan Platform on Sustainable Finance*.

3.3 Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama, dilakukan kegiatan pemetaan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan instrumen-instrumen regulasi lingkungan utama yang diperkenalkan oleh UE dalam periode 2019–2023, beserta dasar hukum, ruang lingkup, dan mekanisme dampaknya terhadap investasi. Pada tahap kedua, bukti empiris dari literatur disintesis secara tematik, diorganisasikan berdasarkan tiga dimensi kunci: (a) pengaruh regulasi terhadap investasi tradisional dan foreign direct investment (FDI); (b) pengaruh

regulasi dan kerangka taksonomi terhadap investasi hijau; serta (c) peran persyaratan pengungkapan dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kredibilitas pasar. Pada tahap ketiga, temuan-temuan dinilai dari segi implikasi kebijakan, dengan memperhatikan pelajaran yang relevan bagi perekonomian negara-negara berkembang.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Lanskap Regulasi Lingkungan UE dan Mekanisme Investasinya

Kerangka regulasi lingkungan UE pasca-2019 dicirikan oleh ambisi, komprehensivitas, dan integrasi eksplisit mekanisme pasar keuangan. *European Green Deal* berfungsi sebagai narasi kebijakan menyeluruh, yang mengkomitkan UE untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 dan menetapkan jalur target dekarbonisasi yang semakin ketat. Paket legislatif *Fit for 55,* yang diadopsi secara bertahap sejak 2021, mengoperasionalkan target-target tersebut melalui reformasi Sistem Perdagangan Emisi UE (EU *Emissions Trading System*/EU ETS), mekanisme penyesuaian batas karbon, serta revisi arahan efisiensi energi dan energi terbarukan.

Regulasi Taksonomi UE (*Regulation* (EU) 2020/852), yang mulai berlaku pada Januari 2022 untuk tujuan terkait iklim dan Januari 2023 untuk empat tujuan lingkungan lainnya (air, ekonomi sirkular, pencegahan polusi, dan keanekaragaman hayati), merepresentasikan pergeseran kualitatif dalam filosofi regulasi. Alih-alih memberlakukan standar emisi yang seragam, Taksonomi menciptakan kerangka klasifikasi sukarela yang memungkinkan para pelaku pasar perusahaan, lembaga keuangan, dan investor untuk mengidentifikasi dan mengomunikasikan keberlanjutan lingkungan dari kegiatan ekonomi. Prinsip *'do no significant harm'* (DNSH) dan perlindungan sosial minimum dari Taksonomi memberikan pagar pembatas terhadap *greenwashing*.

Regulasi Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*/SFDR), yang mulai berlaku pada Maret 2021, mewajibkan para pelaku dan penasihat pasar keuangan untuk mengungkapkan risiko keberlanjutan dan dampak keberlanjutan yang merugikan dalam produk investasi mereka. Arahan Pelaporan Keberlanjutan Korporat (*Corporate Sustainability Reporting Directive*/CSRD), yang memperluas pelaporan non-keuangan wajib kepada sekitar 50.000 perusahaan pada tahun 2026, semakin memperdalam infrastruktur informasi bagi keputusan investasi berkelanjutan. Secara bersama-sama, instrumen-instrumen ini menciptakan rezim pengungkapan berlapis yang dirancang untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kredibilitas sinyal ESG di pasar modal.

4.2 Dampak Regulasi Lingkungan terhadap Investasi

Bukti mengenai dampak agregat regulasi lingkungan UE terhadap investasi bersifat beragam, konsisten dengan literatur teoritis dan empiris yang lebih luas. Di satu sisi, standar lingkungan yang ketat khususnya di sektor-sektor padat karbon yang tercakup dalam EU ETS memberlakukan biaya kepatuhan yang dapat mengurangi profitabilitas jangka pendek dan investasi pada perusahaan-perusahaan yang terdampak. Bukti data panel dari sektor manufaktur UE mengonfirmasi bahwa pengeluaran pengendalian dan penanggulangan polusi (PACE) berkorelasi positif dengan output inovasi (paten), namun tidak secara konsisten diterjemahkan ke dalam total faktor produktivitas yang lebih tinggi, yang mendukung versi lemah namun bukan versi kuat dari Hipotesis Porter (Rubashkina et al., 2015).

Di sisi lain, perluasan kerangka regulasi menciptakan insentif investasi yang kuat di sektor-sektor hijau. Bukti empiris mengindikasikan bahwa pengumuman dan implementasi bertahap

Fase IV EU ETS yang memperkuat penetapan harga karbon telah mendorong perusahaan-perusahaan di sektor yang diregulasi untuk meningkatkan investasi R&D hijau, khususnya dalam lingkungan kebijakan moneter yang akomodatif yang menurunkan biaya pembiayaan investasi tersebut (Lucena-giraldo et al., 2022). Temuan ini menyoroti komplementaritas antara regulasi lingkungan dan kondisi makroekonomi dalam membentuk hasil investasi.

Dampak diferensial regulasi di seluruh negara anggota UE sangatlah substansial. Negara-negara dengan kapasitas kelembagaan yang lebih tinggi, program investasi hijau publik yang lebih kuat (diukur melalui *Government Climate Significant Investment*/GCSI), dan akses yang lebih besar terhadap FDI cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam hal pengurangan emisi maupun mobilisasi investasi hijau. Sebaliknya, anggota UE berpendapatan rendah dengan kerangka kelembagaan yang lebih lemah dan GCSI yang terbatas menghadapi tantangan persisten dalam memenuhi target iklim, yang berisiko menciptakan '*green divide*' intra-UE yang dapat melemahkan ambisi kolektif Green Deal (ScienceDirect, 2025).

4.3 Taksonomi UE dan Mobilisasi Investasi Hijau

Regulasi Taksonomi UE telah memberikan dampak yang terukur terhadap arus investasi hijau sejak implementasinya. Penerbitan obligasi hijau di UE melampaui €500 miliar pada tahun 2023, mencerminkan semakin terintegrasinya kriteria yang selaras dengan taksonomi ke dalam praktik pasar modal. Paket Keuangan Berkelanjutan 2023 selanjutnya memperluas cakupan taksonomi untuk mencakup kegiatan manufaktur dan transportasi tambahan, dengan tujuan meningkatkan kegunaannya dan mengarahkan lebih banyak modal swasta menuju proyek-proyek berkelanjutan (Directorate-General for Financial Stability, 2023).

Bukti eksperimental dari Nipper et al. (2022) menunjukkan bahwa pengungkapan wajib atas metrik pendapatan hijau yang terstandarisasi berdasarkan Regulasi Taksonomi secara signifikan meningkatkan probabilitas investasi hijau dibandingkan dengan penilaian keberlanjutan yang tidak terstandarisasi, khususnya ketika kedua metrik tersebut saling bertentangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa standardisasi regulasi dapat mengatasi kegagalan informasi di pasar modal hijau secara lebih efektif dibandingkan pelaporan sukarela semata.

Meskipun demikian, desain Taksonomi mengandung *trade-off* yang penting. Pencantuman energi nuklir dan gas alam sebagai kegiatan transisional yang diadopsi pada Juli 2022 menimbulkan kontroversi signifikan di dalam UE dan di kalangan para ahli keberlanjutan, menyoroti dimensi ekonomi politik dari desain regulasi. Keputusan-keputusan semacam itu menggambarkan bahwa kredibilitas dan efektivitas kerangka klasifikasi lingkungan tidak hanya bergantung pada kriteria teknis, tetapi juga pada proses tata kelola dan legitimasi pemangku kepentingan.

4.4 Implikasi bagi Keuangan Berkelanjutan di Negara-negara Ekonomi Muslim

Pengalaman UE menawarkan beberapa pelajaran yang dapat ditransfer bagi perekonomian dengan mayoritas Muslim yang berupaya mengembangkan kerangka tata kelola lingkungan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pertama, efektivitas Taksonomi UE sangat bersumber dari fungsi standarisasinya: dengan menciptakan bahasa umum untuk kegiatan berkelanjutan, taksonomi ini mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan pasar. Perekonomian dengan mayoritas Muslim yang mengembangkan kerangka investasi halal dan berkelanjutan dapat memperoleh manfaat serupa dari sistem klasifikasi yang terharmonisasi, yang mengintegrasikan kepatuhan Syariah dengan kriteria keberlanjutan lingkungan.

Kedua, pengalaman UE menunjukkan bahwa integrasi regulasi lingkungan dengan mekanisme pasar keuangan melalui persyaratan pengungkapan, standar obligasi hijau, dan produk investasi yang selaras dengan taksonomi lebih efektif dibandingkan regulasi *command-and-control* semata dalam memobilisasi investasi hijau swasta. Wawasan ini sangat relevan bagi perekonomian dengan sektor perbankan Islam yang besar, di mana inovasi produk dalam green sukuk dan instrumen keuangan Islam berkelanjutan dapat berfungsi sebagai wahana mobilisasi investasi hijau.

Ketiga, pengalaman UE dengan heterogenitas regulasi di seluruh negara anggota menunjukkan bahwa pendekatan *one-size-fits-all* mungkin tidak memadai. Desain kebijakan harus memperhitungkan perbedaan kapasitas kelembagaan, struktur ekonomi, dan tingkat pembangunan faktor-faktor yang sama pentingnya, jika tidak lebih, dalam lanskap perekonomian dengan mayoritas Muslim yang beragam.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengkaji hubungan antara kerangka regulasi lingkungan UE dan perilaku investasi, dengan fokus pada periode pasca-2019 yang dicirikan oleh *European Green Deal*, Regulasi Taksonomi UE, SFDR, dan CSRD. Analisis mengungkapkan dinamika ganda: regulasi lingkungan memberlakukan biaya kepatuhan jangka pendek yang dapat membatasi investasi di sektor-sektor padat karbon, sekaligus menciptakan insentif yang kuat bagi investasi hijau melalui standardisasi definisi kegiatan berkelanjutan, pengurangan asimetri informasi, dan peningkatan kredibilitas pasar.

Bukti empiris yang disintesis di sini mendukung versi lemah Hipotesis Porter bahwa regulasi lingkungan yang dirancang dengan baik merangsang inovasi sekaligus menunjukkan bahwa taksonomi keuangan berkelanjutan UE telah efektif dalam memobilisasi modal swasta menuju kegiatan-kegiatan hijau. Namun demikian, dampak diferensial di seluruh negara anggota UE menggarisbawahi pentingnya kapasitas kelembagaan, investasi publik komplementer, dan prediktabilitas regulasi sebagai kondisi-kondisi yang memungkinkan investasi hijau yang didorong oleh regulasi.

Beberapa keterbatasan penelitian ini perlu diakui. Ketergantungan pada data sekunder dan sintesis literatur berarti bahwa identifikasi kausal atas dampak regulasi secara inheren terbatas. Lebih lanjut, evolusi lanskap regulasi UE yang pesat dengan instrumen-instrumen baru dan amandemen yang masih terus ditetapkan berarti bahwa basis bukti yang tersedia masih belum lengkap. Penelitian mendatang hendaknya menggunakan metode ekonometrik data panel untuk menguji efek kausal instrumen-instrumen regulasi tertentu terhadap hasil investasi, serta lebih jauh mengeksplorasi penerapan kerangka UE dalam konteks dunia Muslim.

Bagi para pembuat kebijakan di perekonomian dengan mayoritas Muslim, pengalaman UE menawarkan pelajaran berharga mengenai penggunaan standarisasi regulasi, pengungkapan wajib, dan instrumen keuangan hijau untuk mengarahkan investasi menuju pembangunan berkelanjutan. Penyelarasan kerangka-kerangka tersebut dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan bagi hasil, kesejahteraan sosial, dan larangan terhadap kemudharatan dapat menyediakan lahan yang sangat subur bagi pengembangan ekosistem investasi berkelanjutan dan halal yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ambec, S., Cohen, M. A., Elgie, S., & Lanoie, P. (2013). The Porter Hypothesis at 20 : Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness ? 7(1), 2–22. https://doi.org/10.1093/reep/res016

Copeland, Brian R. Taylor, M. S. (2004). Trade, Growth, and the Environment. Journal of Economic Literature 42 (1): 7–71. https://doi.org/10.1257/002205104773558047

Directorate-General for Financial Stability, F. S. and C. M. U. (2023). Sustainable finance package 2023 - Finance. https://finance.ec.europa.eu/publications/sustainable-finance-package-2023_en

European Commission. (2019). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Lucena-giraldo, J., Rodríguez-crespo, E., & Salazar-elena, J. C. (2022). The creative response of energy-intensive industries to the Emissions Trading System in the European Union. Journal of Cleaner Production, 373(April), 133700. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133700

Nerlich, C., Köhler-ulbrich, P., Andersson, M., Pasqua, C., Abraham, L., Ba, K., Emambakhsh, T., Ferrando, A., Grynberg, C., Groß, J., Hoendervangers, L., Kostakis, V., Momferatou, D., Rau-goehring, M., Rariga, E., Rusinova, D., Setzer, R., Spaggiari, M., Tamburrini, F., … Simon, V. (2025). Occasional Paper Series (Issue 367). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op367~16f0cba571.en.pdf

Nipper, Marvin. Ostermaier, Andreas. Theis, J. (n.d.). MANDATORY DISCLOSURE OF STANDARDIZED SUSTAINABILITY METRICS: THE CASE OF THE EU TAXONOMY REGULATION. https://arxiv.org/pdf/2205.15576

Noailly, J. (2022). DOES ENVIRONMENTAL POLICY UNCERTAINTY HINDER INVESTMENTS TOWARDS A LOW-CARBON ECONOMY? https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30361/w30361.pdf

Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. Macmillan.

Porter, M. E., & Linde, C. Van Der. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. 9(4), 97–118. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Rubashkina, Y., Galeotti, M., & Verdolini, E. (2015). Environmental regulation and competitiveness : Empirical evidence on the Porter Hypothesis from European manufacturing sectors. Energy Policy, 83, 288–300. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.02.014